

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

“Dunia ekonomi telah memasuki suatu fase ketidakstabilan yang luar biasa dan perjalanan masa depannya benar-benar tidak pasti” tulis Helmut Schmidt kira-kira satu dekade yang lalu.¹

Ketidakstabilan terus berlangsung dan ketidakpastian berlanjut. Sesudah melalui masa-masa inflasi tingkat tinggi yang menyakitkan perekonomian dunia telah mengalami satu resesi mendalam dan laju pengangguran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dibarengi dengan laju suku bunga riil yang tinggi dan fluktuasi valutu asing yang tidak sehat. Meskipun penyembuhannya kini tengah berlangsung namun ketidakpastian tetap berlanjut . Laju suku bunga yang riil tetap tinggi dan ini diperkirakan akan terus meningkat, sehingga meningkatkan kecemasan adanya penyembuhan yang gagal. Krisis ini juga diperburuk dengan oleh adanya kemiskinan di tengah orang-orang kaya di semua negara, berbagai bentuk ketidakadilan sosioekonomi, defisit neraca pembayaran yang besar dan ketidakmampuan sebagian besar negara-negara berkembang untuk mencicil utang mereka. Menurut M.Umer Chapra dalam bukunya *Sistem Moneter Islam* krisis ini

¹Helmut Schmidt, *the Structure of the World Product* (Foreign Affairs,1974), h. 437 dikutip oleh M.Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam, (terjemahan Towards a just Monetary)* Jakarta : Gema Insani Press, 2000, h. xix

terjadi karena banyak faktor yang menyebabkannya dan yang paling utama adalah kesalahan pada falsafah dasar kehidupan dalam berekonomi.²

Secara umum perekonomian dibagi menjadi 2 (dua) sektor yaitu ; sektor moneter (berkaitan dengan keuangan) dan sektor riil (berkaitan dengan barang dan jasa). Idealnya kedua sektor ini harus berjalan seiring dan saling mendukung karena kepincangan pada salah satu sektor akan menyebabkan kepincangan pada sektor yang lain. Krisis keuangan global yang terjadi pada saat sekarang ini adalah bukti dimana pengelolaan sektor moneter sudah jauh meninggalkan sektor riil. Hal ini tentunya terjadi diakibatkan oleh sistem moneter yang didominasi oleh sistem bunga.³

Apabila kestabilan dalam kegiatan perekonomian terganggu, maka kebijakan moneter dapat dipakai untuk memulihkan (tindakan stabilisasi). Pengaruh kebijakan moneter pertama kali akan dirasakan oleh sektor perbankan, yang kemudian ditransfer pada sektor riil.⁴ Sistem moneter pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa dibidang keuangan oleh lembaga-lembaga penunjang lainnya seperti pasar modal dan pasar uang. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa sistem moneter meliputi seluruh aspek pengelolaan keuangan,

²*Ibid.*, h. xx

³Muhammad Yafiz, "Sistem Moneter Islam: Analisis Teoritis dan Perbandingannya," dlm Muhammad Iqbal, peny., *Islam Mazhab Swalayan*, (Bandung :Ciptapustaka Media Perintis, 2010), h.37.

⁴Veitzhal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Menagemant, Conventional and Sharia System* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 83

baik institusi, regulasi dan kebijakan serta instrumen-instrumen pendukungnya dalam memenuhi pencapaian tujuannya.⁵

Sedangkan pengertian kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu pengaturan di bidang moneter yang bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang dan mendorong kelancaran produksi dan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁶

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif / Monetary Expansive Policy Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif / Monetary Contractive Policy adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

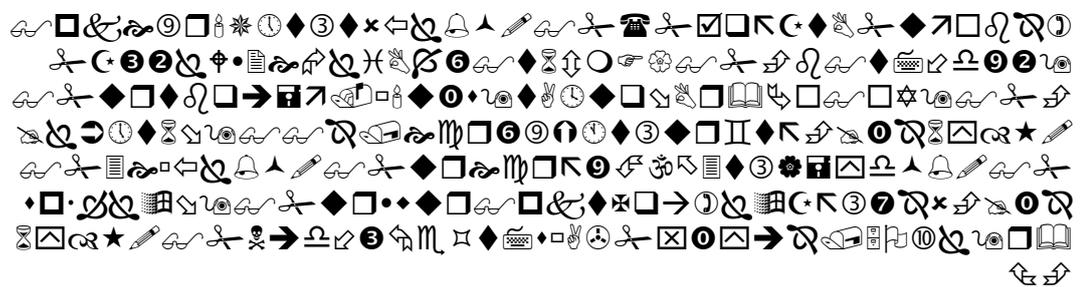
Dalam konsep Islam, uang merupakan milik masyarakat (*money is pulic goods*). Barangsiapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang beredar yang mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya adalah terhambatnya proses pertukaran dalam perekonomian.⁷

⁵*Ibid*

⁶Aulia Pohan, *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, cet 1(Jakarta: Rajawali Pres, 2008), h. 11

⁷Amir Machnud dan Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta : Erlangga, 2010), h. 45

Disamping itu, penumpukan uang atau harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat yang tidak baik seperti tamak dan rakus serta malas beramal. Sifat-sifat ini tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu, Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Qur`an surah At-taubah ayat 34 berikut⁸:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih".

Disamping itu, jumlah uang disimpan yang tidak dimanfaatkan disektor produktif akan semakin berkurang karena adanya kewajiban zakat bagi umat Islam Oleh karena itu uang harus berputar (*money as flow concept*).⁹ Islam sangat menganjurkan bisnis atau perdagangan, investasi di sektor riil. Uang yang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar *medium of exchange* dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang sendiri tidak memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar

⁸Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 192
⁹Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, Bandung, Ciptapustakamedia perintis, 2012, h. 59

dengan benda yang nyata atau digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi atau barang yang dapat diperdagangkan.

Secara prinsip tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan Al-qur`an dalam QS.Al-An`am:152¹⁰

..... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ

“Dan sempurnkanlah takaran dan timbangan dengan adil”

Mengenai stabilitas nilai uang juga ditegaskan adalah sebagai kerangka kebijakan moneter dalam perekonomian Islam adalah stok uang, sasarannya haruslah menjamin bahwa pengembangan moneter yang tidak berlebihan melainkan cukup untuk sepenuhnya dapat mengeksploitasi kapasitas perekonomian untuk menawarkan barang dan jasa bagi kesejahteraan sosial umum.¹¹ Namun dalam sistem konvensional uang tidak hanya sekedar alat tukar lagi tetapi untuk spekulasi karena adanya masyarakat yang melakukan pinjam-meminjam uang dengan sistem bunga. Meningkatnya transaksi di pasar uang yang bersifat semu, mengakibatkan ketersediaan uang terus menggelembung, sementara nilai nominalnya tidak di dukung oleh nilai instriknya. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya ekonomi balon atau penggelembungan balon itu bisa disebut juga

¹⁰Al-Qur`an., h. 149

¹¹M.Umar Chapra, *Al-Qur`an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, (Yogyakarta :Dana Bakti Prima Yasa,1997), h.6

sebagai *bubble economic* dimana laju pertumbuhan sektor riil yang cenderung terabaikan.¹²

Jika diasumsikan *money supply* (uang beredar) tetap maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar-pasar moneter akan menyedot uang beredar. Sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang akan terjadi tetapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada *returns* yang diperebutkan sektor moneter. Sehingga jika ini terus terjadi maka kecendrungan krisis akan terus berulang. fenomena ini merupakan salah satu faktor yang memicu terjadinya krisis nilai tukar di berbagai Negara di dunia, seperti Negara-negara Asia pada tahun 1997 dan krisis keuangan global yang terjadi saat ini di Amerika dan berimbas ke negara-negara lainnya.

Dari bahasan diatas memperjelas bahwa kebijakan moneter mestinya memainkan peranan penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan Islam Meskipun demikian, adanya penghapusan bunga yang tidak disertai dengan adanya alat *discount rate* serta pasar bebas yang berjalan bagi kekayaan pemerintah, kiranya wajar jika timbul pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana caranya meyelaraskan antara penawaran dan permintaan uang tanpa adanya bunga yang berfungsi sebagai mekanisme pengatur dan alternatif apakah yang dapat menggantikan bunga yang biasanya diperoleh pemerintah untuk menutup defesit anggaran belanja pemerintah dalam rangka *non inflationary* ? Apakah instrumen kebijakan moneter dalam Islam terutama menurut M.Umer Chapra dan bagaimana peranan bank sentral dalam mewujudkan sistem ekonomi tanpa bunga?

¹²Yafiz , *Sistem Moneter*, h. 41

Dari latar belakang masalah tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS KEBIJAKAN MONETER ISLAM MENURUT M.UMER CHAPRA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra?
2. Apa saja sumber-sumber ekspansi moneter menurut M.Umer Chapra?
3. Apakah instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter menurut M.Umer Chapra?

C. Batasan Masalah

Untuk mmelihara konsistensi dalam penggunaan istilah yang digunakan da;am penelitian ini, beberapa istilah kunci yang terdapat di dalamnya agar diberikan batas pengertian sehingga terhindar dari kemungkinan terjadinya multi interpretasi atas istilah istilah yang digunakan. Kebijakan moneter adalah tindakan pemerintah (atau bank sentral) untuk mempengaruhi situasi makro yang dilaksanakan melalui pasar uang. Ini adalah defenisi umum dari kebijakan moneter, secara lebih khusus, kebijakan moneter bisa diartikan sebagai tindakan makro pemerintah dalam hal ini adalah bank sentral dengan cara mempengaruhi

proses penciptaan uang.¹³ Dalam hal ini penulis akan membatasi pada permasalahan kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra.

Instrumen adalah variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan control terhadap upaya pencapaian sasaran antara.¹⁴ Di dalam pelaksanaan kebijakan moneter bank sentral biasanya menggunakan berbagai piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Dalam hal ini peneliti akan memfokuskan pada instrumen-instrumen kebijakan moneter yang digunakan oleh M.Umer Chpra.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memeberikan jawaban terhadap pertanyaan yang telah dibatasi pada rumusan masalah yang mengacu pada *inventarisasi*¹⁵ yakni mengumpulkan karya M.Umer Chapra yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, kemudian berupaya untuk merumuskannya dengan metodologi yang jelas agar menjadi gagasan yang lebih utuh dan sistematis. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang:

1. Kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra.
2. Sumber-sumber ekspansi moneter menurut M.Umer Chapra.
3. Instrumen kebijakan moneter menurut M.Umer Chapra.

¹³ Boediono, *Pengantar Ilmu Ekonomi No.2 Ekonomi Makro* (Yogyakarta:BPFE ,2001) h. 96

¹⁴ Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003),h.98

¹⁵Inventarisasi : membaca dan memepelajari secara luas dan mendalam pemikiran seorang tokoh sehingga dapat diuraikan setepat dan sejelas mungkin. Hal ini sangat urgent dilakukan karena untuk mengetahui pemikiran seorang tokoh akan sukar dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai pemahaman yang mendalam terhadap objek yang diteliti. Syahri Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Jakarta: Mulya Istiqomah Press, 2006) h.41.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan berguna untuk:

1. Teoritis

Memformulasikan konsep kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra. Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam kajian kebijakan ekonomi moneter Islam.

2. Praktis

- a. Sebagai sumber informasi untuk mengembangkan kebijakan moneter Islam di Indonesia
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah dalam hal kebijakan moneter Islam menurut M.Umer Chapra kemudian diterapkan di pemerintahan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk memperoleh gelar Magister di program studi Ekonomi Islam pada program pascasarjana IAIN Sumatera Utara.

F. Kajian Terdahulu

Isnu Taufik “*Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra Tentang Sumber-sumber Utama Ekspansi Moneter*” Tesis, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2005. Dalam penelitian tersebut dia menyimpulkan bahwa: Dalam perspektif M.Umer Chapra untuk menciptakan iklim pertumbuhan moneter yang memadai dalam arti mencukupi, dan tidak "berlebihan", perlu memonitor secara hati-hati tiga sumber utama ekspansi moneter.

Dua di antaranya adalah domestik. Pertama, membiayai defisit anggaran pemerintah dengan meminjam dari bank sentral. Kedua, ekspansi deposito melalui penciptaan kredit pada bank-bank komersial. Ketiga, bersifat eksternal, yaitu "menguangkan" surplus neraca pembayaran luar negeri. Karakteristik pemikiran ekonomi Islam M.Umer Chapra merefleksikan keunikan, yang dapat dikemukakan dalam beberapa hal.

Pertama, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai sistem moneter Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik. Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi moneter Islam.

A.F. Darrat (1998) dalam Ahmad (2000) melakukan penelitian tentang "*Stabilitas Moneter dalam Sistem Perbankan Islam*". Stabilitas sistem perbankan direfleksikan melalui perkembangan jumlah uang yang beredar (M1). Menurut Darrat, instrumen-instrumen moneter Islam lebih stabil pengaruhnya terhadap stabilitas moneter dibandingkan dengan instrumen-instrumen dalam perbankan konvensional.

Rahman¹⁶ melakukan kajian pemikiran Chapra tentang nilai-nilai sistem ekonomi Islam, yang meliputi tauhid, khilafah dan keadilan. Kajiannya diawali dengan menguraikan konsep Chapra tentang ekonomi Islam, prinsip dasar

¹⁶M. Abdul Rahman, Konsep Nilai-nilai Sistem Ekonomi: Studi Analisa Pemikiran Muhammad Umer Chapra, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, tidak dipublikasikan

sistem ekonomi Islam dan implikasinya, dasar hukum nilai sistem ekonomi Islam, serta tujuan sistem ekonomi Islam. Selanjutnya Rahman mengkaji tentang implikasi pemikiran nilai ekonomi Islam Chapra dalam aktifitas ekonomi, baik dalam bidang produksi, konsumsi maupun distribusi. Menurut Rahman, konsep nilai ekonomi Islam Chapra berangkat dari ekonomi modern.

Ekonomi konvensional dianggap telah gagal menjamin keadilan distribusi, pertumbuhan yang berkeimbangan, pembangunan manusia yang seimbang, keharmonisan sosial dan persamaan regional bagi mayoritas umat Islam yang dihadapkan persoalan resesi, pengangguran dan stagnasi. Kegagalan ilmu ekonomi dalam pandangan Chapra terletak pada pengabaian nilai-nilai sosial dan etika. Bahkan tujuan-tujuan sosial dikesampingkan dan dipandang sebagai konsekuensi dari kemajuan teknik dari pada sebagai kemajuan peradaban.

Lindayanti¹⁷ berusaha membandingkan antara pemikiran Chapra dengan Mubyarto. Hasil penelitian Lindayanti menunjukkan bahwa keduanya menolak ketidakadilan dan menekankan aspek kemanusiaan dan ketuhanan, serta pemenuhan kebutuhan secara seimbang. Keduanya berpijak dari realitas sosial masyarakat miskin yang tertindas secara ekonomi, sosial dan politik. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek. Kata kunci yang digunakan Chapra adalah tauhid, khilafah dan `adalah, sedang Mubyarto menggunakan moralitas agama, titah Tuhan dan keadilan dengan pemerataan dan kerakyatan. Pada landasan konseptual, ekonomi Islam selalu merujuk pada al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan Pancasila bersumber pada lima sila yang terdapat dalam Pancasila.

¹⁷Wiwin Lindayanti, Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila: Studi Perbandingan Pandangan Chapra dan Mubyarto, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007, tidak dipublikasikan

Afifah¹⁸ juga telah melakukan eksplorasi tentang kritik Chapra terhadap konsep negara kesejahteraan. Menurut Afifah, welfare state tidak berjalan efektif dan tidak mencapai tujuan egaliternya karena kesalahan kapitalisme dalam kerangka filosofi, strategi, dan logika yang hanya membangun kesejahteraan aspek materiil. Menurut Chapra, negara kesejahteraan merupakan suatu bentuk komprehensif yang saling berkaitan antara negara, ekonomi dan Islam yang bermuara pada tujuan satu, yaitu menciptakan kesejahteraan umat. Chapra mengklasifikasi keterkaitan tersebut dalam basic imperatives dan fungsi ekonomi. Suatu negara harus melakukan orientasi demokrasi, tanggung jawab kesejahteraan, strategi kesejahteraan, kualitas spiritual dan penyediaan sumber-sumber daya halal. Dalam hal fungsi ekonomi, negara harus dapat menciptakan fungsi ekonomi untuk menghapus kemiskinan, full employment dan tingkat pertumbuhan tinggi, stabilitas nilai uang riil, hukum dan tata tertib, keadilan sosial dan ekonomi, perlindungan sosial dan keadilan serta distribusi kekayaan.

Darliah¹⁹ membahas tentang gagasan Chapra tentang sistem moneter. Ia menekankan kajiannya pada aspek keadilan sosial dan ekonomi bebas bunga yang sesuai dengan ajaran Islam. Menurutnya, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, memperluas lapangan pekerjaan, optimalisasi pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya keadilan ekonomi bagi setiap individu, maka dibutuhkan stabilitas nilai mata uang.¹⁹

¹⁸Umi Afifah, Negara Kesejahteraan dalam Pemikiran Islam Kontemporer: Studi Pemikiran Chapra, Tesis S2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak dipublikasikan.

¹⁹Yuni Darliah, Pemikiran Ekonomi Islam Sektor Moneter Menurut M. Umer Chapra, Tesis S2 UII Yogyakarta, 2002, tidak dipublikasikan.

Zaroni,²⁰ melakukan kajian tentang kritik Chapra terhadap ekonomi pembangunan. Menurut Zaroni, Chapra telah mengkritik terhadap kesalahan-kesalahan paradig dalam teori ekonomi pembangunan yang diusung oleh Barat. Kesalahan teori tersebut berpengaruh pada kesalahan kebijakan dan strategi.

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yakni jenis penelitian library reasearch (penelitian kepustakaan) adapun pendekatan yang digunakan:

a. Pendekatan deskripsi analitis

Metode ini digunakan berupaya mencari informasi sedalam-dalamnya, kemudian diadakan analisa. Selanjutnya dari informasi yang telah diperoleh akan diberikan kesimpulan

b. Pendekatan Sejarah

Metode yang digunakan untuk mengetahui sejarah hidup tokoh yang menjadi sumber penelitian. Dengan diketahuinya sejarah hidup M.Umer Chpara dapat mempermudah bagi peneliti untuk mengadakan analisi yang berkenaan dengan pandangannya terutama tentang kebijakan moneter dalam perekonomian Islam.

2. Penentuan Data

Data yang diperlukan diambil dari berbagai literatur berupa buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, terutama yang berkaitan dengan

²⁰Akhmad Nur Zaroni, Kritik Umar Chapra terhadap Ekonomi Pembangunan, Tesis S2 UII Yogyakarta, 2000, tidak dipublikasikan

kebijakan moneter Islam menurut M.Umar Chapradan ekonomi Islam secara umum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian M.Umar Chapra ini, penulis mengumpulkan buku-buku yang berhubungan dengan M.Umar Chapra yang terdiri dari data primer, yaitu buku-buku yang berkenaan dengan tema pembahasan, seperti *Towards a just Monetary System* diterbitkan di London pada tahun 1985, *Al Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil* diterbitkan di Yogyakarta pada tahun 1997, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam* diterbitkan di Jakarta pada tahun 2008.

Dan di tambah data yang lain dari data sekunder , yaitu buku-buku pendukung terhadap sumber pokok yaitu sumber atau referensi baik dalam tulisan M.Umer Chpara sendiri maupun dari tulisan orang lain yang berkaitan dengan ekonomi moneter.

4. Teknik Pengolahan Data

Langkah awal yang digunakan dalam teknik pengolahan data ialah setelah data yang dikumpulkan dianggap sudah cukup, selanjutnya mereduksi data. Data dikelompokkan, dikategorikan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data yang akan diperoleh akan dianalisa secara cermat.

5. Sistem Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini mengacu pada sistem penulisan yang diakui pada pedoman penulisan proposal dan tesis Program Pascasarjana Institut Agama

Islam Negeri Sumatera Utara yang diterbitkan oleh Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara.

6. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tesis dituangkan dalam lima bab, dan setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistematis, dan logis.

BAB I Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Biografi M.Umer Chapra yang terdiri dari: latar belakang kelahiran dan keluarga, latar belakang pendidikan dan karya-karyanya, karier dan kegiatan M.Umer Chapra serta pendapat beberapa tokoh mengenai M.Umer Chapra.

BAB III Kebijakan Moneter dalam Konsep Ekonomi Islam yang terdiri dari Pengertian Kebijakan Moneter Landasan Hukum, Tujuan Kebijakan Moneter dan instrumen-instrumen moneter dalam ekonomi Islam.

BAB IV Kebijakan Moneter Menurut M.Umer Chapra yang terdiri strategi pengembangan moneter M.Umer Chpara, Sumber pengembangan monete M.Umer Chpara, Instrumen kebijakan moneter menurut M.Umer Chapra, dan Relevansi Antara Kebijakan Moneter menurut M.Umer Chapra dengan Kebijakan Moneter dalam Konteks Keindonesiaan.

BAB V Penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan Saran-Saran